



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

UNIT KERJA : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS MUJI HARTONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 893885

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 599.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 289 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 99.000.000
3. Tanah Seluas 492 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 92.000.000
4. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 68.000.000
5. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 303.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, PIAGIO VESPA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	969.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	969.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.